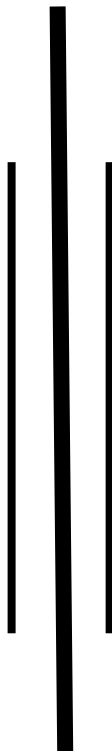


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
SEMESTER II
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 057.1 / SK / 2026

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH SEMESTER II TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :**
- bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
 - bahwa dengan adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh Nomor 065/01312/2025 Tentang Teknis Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Banda Aceh dan OPD tahun 2025 Serta Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banda Aceh dan OPD Tahun 2026;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c, dan d maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester II Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester II Tahun 2025 adalah untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Januari 2026 M

**Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



Ir. MUHAMMAD ZUBIR, S.SiT.,M.Si.
Pembina Tingkat I /
NIP. 19780816 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Semester II tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Diskominfo Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah tercantum di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2023-2026. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2025.

Akhirnya Dokumen LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh Semester II Tahun 2025 di dalam pengerjaannya serta penyajiannya telah diupayakan untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Dokumen LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	2
1.4. Gambaran Umum	3
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Tujuan dan Sasaran	11
2.2.1.Tujuan	11
2.2.2.Sasaran	12
2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	14
2.4. Rencana Kinerja.....	17
2.5. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1..Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Renstra 2023-2026.....	21
3.1.2..Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, Kendala dan Alternatif Solusi/ Upaya	24
3.1.3..Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program Diskominfo.....	33
3.1.4..Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	38
3.2. Realisasi Anggaran	41

3.2.1..Capaian Diskominfofik Sepanjang Tahun 2024 46

3.2.2..Strategi/Langkah/Kebijakan Upaya Perbaikan Kinerja 47

BAB IV PENUTUP 50

LAMPIRAN

Ikhtisar Eksekutif

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Semester II Tahun 2025 telah selesai disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2023-2026, Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Diskominfo Kota Banda Aceh selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen LKjIP ini menguraikan pencapaian kinerja yang tertuang di dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan tupoksi Diskominfo Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis secara menyeluruh yang telah dilaksanakan pada Semester II tahun 2025 serta beberapa hal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya.

Simpulan LKjIP Diskominfo Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama;
2. Pencapaian sasaran strategis tersebut direncanakan akan dicapai dengan pelaksanaan 5 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan, dimana pada pelaksanaannya terjadi pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berkurang menjadi 3 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan;
3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan dapat terlaksana dengan baik;
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBD Kota Banda Aceh dengan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp 26.608.352.834,- dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 25.575.941.069, atau dengan presentase 96,12%;
5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2025 menghadapi beberapa kendala yang dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan, dan
6. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan meskipun banyak permasalahan dan hambatan yang dialami.

Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester II Tahun 2025 ini merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini memerlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan LKjIP Diskominfo dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

Dalam rangka terselenggaranya sistem pemerintahan (good governance) Kota Banda Aceh yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan good governance ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Diskominfo adalah media atau dokumen akuntabilitas kinerja yang dipakai oleh Diskominfo untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfo kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2023-2026 dimana Renstra ini merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang berkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi Diskominfo Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

instansi. LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh berisi laporan tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen LKjIP diharapkan dapat memberikan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tupoksi Diskominfo serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Beberapa tujuan utama dari LKjIP Diskominfo yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfo Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Diskominfo Banda Aceh di dalam melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfo Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Diskominfo Kota Banda Aceh atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh;
5. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Diskominfo, dan
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfo bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo serta mencari solusi pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Rumusan strategi Diskominfo menunjukkan adanya keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan dari Diskominfo. Beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Diskominfo yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo.

1.4. Gambaran Umum

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para *Stakeholder* lainnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi

kewenangan Kota Banda Aceh dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yaitu melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

C. Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga pemerintah kota Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 54 tanggal 20 Desember 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 - a) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - b) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
 - 2) Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - c) Bidang E-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
 - d) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Hubungan Media, dan
 - 2) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
 - e) Bidang Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Survei Sektoral, dan
 - 2) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1., 1.2, 1.3, dan 1.4.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	6	2	8	
4	III/d	6	3	9	
5	III/c	2	-	2	
6	III/b	3	1	4	
7	III/a	2	1	3	
8	II/d	1	2	3	
9	II/c	-	-	-	
	Jumlah PNS	22	9	31	
	Non PNS				
9	Peg. Kontrak	17	8	25	
	Jumlah Non PNS	17	8	25	
	JML PNS + NON PNS	39	17	56	

(Sumber: Subbagian Kepegawaian, Umum dan Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2025)

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Jabatan Fungsional	IV. a	8
5	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	IV. a	1
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		15

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh,Tahun 2025)

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfo Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20
3	D IV	0
3	D III	3
4	SLTA/Sederajat	2
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	31

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh,Tahun 2025)

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM – II	1
2	S pama / PIM – III	4
3	Adum / PIM – IV	10
Jumlah		15

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh , Tahun 2025)

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025 pada dasarnya berfungsi untuk menyampaikan pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banda Aceh sampai dengan akhir Semester II Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut kemudian dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Diskominfo dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan sebagai berikut.

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Tujuan dan Sasaran

- 2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Rencana Kinerja
- 2.5. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Diskominfo akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis disusun untuk menindaklanjuti program-program yang ada pada RPD dan diwujudkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan OPD berdasarkan kewenangan dari OPD. Hal ini membuat Renstra tidak terlepas dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra Provinsi.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rumusan strategi Diskominfo menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfo ingin menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan yang diberikan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfo adalah :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib

administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terfokus di dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Diskominfo. Kebijakan yang dilakukan Diskominfo adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian kinerja. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Diskominfo Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2023-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2023	2024	2025	2026			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi			-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%	Bidang Statistik	Laporan Tahunan
	1.1.2	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%	Bidang Pip & Bidang Hubmed Dan Penyelenggara an Smart City	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.1.3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%	Bidang E-Gov Dan Bidang Hubmed & Penyelenggara an Smart City	Laporan Triwulan dan Tahunan

(Renstra dan IKU Diskominfo 2023-2026)

2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya melalui penetapan dan pelaksanaan satu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan dan dirincikan lagi ke dalam beberapa sub kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

- 2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - 3.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - 3.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - 3.1.5. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - 3.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
 - 3.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 4.1.2. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.4. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator tujuan dan sasaran kinerja serta target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang akan dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2025 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo (IKU) Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA (%)
1	2		3
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		100
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31
	1.1.2	Persentase website OPD yang aktif	86
	1.1.3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah beban kerja kepada atasan langsung atau bisa juga merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus dari Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	86%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61%

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	688.899.913
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.935.900
			Pelayanan Informasi Publik	60.000.000
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	55.888.307
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	58.371.382
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	15.000.000
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	15.000.000
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	46.742.000
			Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	38.150.919
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	42.987.367
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	153.115.626

			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	100.000.000
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	76.204.000
			Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	-
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-
			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	100.000.000
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.076.730
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada dokumen Renstra 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2025. Capaian kinerja Diskominfo pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Persentase	31%	31%	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	Persentase	86%	86%	100%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	61%	61%	100%

Pada Tabel 3.1 bisa dilihat bahwa pada tahun 2025 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo, dimana pada sasaran strategis pertama terdapat satu indikator kinerja yang mencapai realisasi target 100%. Pada sasaran strategis yang kedua terdapat dua indikator kinerja dimana semua indikator tersebut mencapai realisasi target 100%.

3.1.1. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Renstra 2023-2026

A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan satu indikator yang harus terpenuhi yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2024	Semester II 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	5%	29%	31%	31%	100%	33%	93,9%

Persentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$ dan melihat kepada capaian atau realisasi kinerja pada tahun 2025 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 31%.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebesar 5%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 sendiri Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 29% dimana capaian ini sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara itu capaian target kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 31%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 93,9%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik sektoral oleh Diskominfo. Pada tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya. Diskominfo harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu terbaru (*update*) atau tepat waktu serta terus meningkatkan sinergitas dengan para *stakeholder* data statistik sektoral, baik di dalam lingkungan OPD Pemerintah Kota Banda Aceh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Universitas yang ada di Kota Banda Aceh dan *stakeholder* lainnya.

Sementara itu untuk mencapai target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu didukung oleh 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional dimana tingkat realisasi anggarannya tidak mencapai target atau 0%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Website OPD yang Aktif dan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2024	Semester II 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase website OPD yang aktif	65%	84%	86%	86%	100%	88%	97,7%
2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	0%	59%	61%	61%	100%	63%	96,8%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 2 (dua) indikator dimana kedua indikator ini semuanya mencapai target yang ditetapkan. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dimana angka realisasi pencapaian dari Website OPD yang Aktif adalah sebesar 86% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula
$$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%.$$
 Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebesar 65%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 adalah sebanyak 84% dan sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 86%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai angka 97,7%. Tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan update berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website yang dikelola oleh OPD pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan. Bahkan di tahun 2025 realisasi capaian mencapai

100% yang berarti telah melampaui target 84% yang telah ditetapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan dapat dipantau secara langsung oleh publik melalui aplikasi sinergi di alamat: sinergi.bandaacehkota.go.id.

2. Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 61% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 61%. Angka ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang telah ditetapkan. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$. Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 0%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 sendiri Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 59% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Hal ini disebabkan oleh adanya Revisi pada Renstra dan IKU Diskominfo sehingga Target Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government ini baru dilakukan pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2026, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai angka 96,8%.

3.1.2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Alternatif Solusi/Upaya

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dari Diskominfo untuk target kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebanyak 31%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, target yang diharapkan pada tahun 2025 masih sesuai dengan Renstra Diskominfotik tahun 2023-2026. Pada tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah :

- Belum bakunya bentuk data statistik sektoral yang digunakan di lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih terjadinya benturan penyediaan data sektoral yang dibutuhkan diantara OPD yang menjadi sumber atau produsen data dengan Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai pengelola data;
- Kebijakan refocusing anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat pada Pemerintah Kota Banda Aceh semenjak tahun 2021 memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian dan pengalihan prioritas anggaran yang diberikan kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu dihapus dan dialihkan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas;
- Penerapan standar data statistik dan metadata statistik masih belum maksimal meski terdapat peraturan yang mengikat, pelaksanaannya belum seragam di seluruh OPD. Metadata yang disusun masih terbatas pada kegiatan, belum mencakup metadata variabel dan indikator secara menyeluruh;

- Indikator penjaminan aktualitas dan pemantauan waktu diseminasi belum seragam di seluruh OPD dikarenakan Pemahaman OPD terkait statistik sektoral, khususnya mengenai metadata dan standar data, belum merata. Selain itu sebagian OPD masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian data akibat keterbatasan SDM pengelola data sehingga kualitas data antar OPD belum sepenuhnya seragam sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses validasi;
- Integrasi data lintas sistem OPD masih dilakukan secara bertahap;
- Pemanfaatan data statistik masih belum maksimal dikarenakan Surat Keputusan Kepala Bappeda No. 60 Tahun 2024 tidak melibatkan Diskominfo sebagai pengguna data untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, atau penyusunan kebijakan sehingga menyebabkan pengelolaan kegiatan Statistik masih kurang maksimal karena belum ada aturan baku bagi OPD untuk melaporkan kegiatan statistik kepada BPS;
- Penyiapan bukti dukung, seperti rekomendasi kegiatan statistik (Romantik), belum tersedia secara maksimal misalnya pada kegiatan pencacahan hotel oleh Dinas Pariwisata, dan
- Penguatan sistem Statistik nasional belum maksimal dikarenakan oleh bukti pemanfaatan *Big Data* yang tidak dilakukan oleh instansi pemerintah setempat (contoh: penggunaan CCTV oleh Kepolisian dan komunitas

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah :

- Diskominfo tetap berupaya maksimal meskipun tidak tersedianya anggaran dengan melakukan beberapa strategi seperti menjalin kerja sama intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, Universitas Negeri dan Swasta di Kota Banda Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, Politeknik Aceh dan Universitas Lainnya dan *stakeholder* lainnya;
- Diskominfo juga terus berupaya melakukan pembakuan bentuk dataset statistik sektoral yang digunakan, menyusun konsep dasar, metodologi, dan tata kelola satu data, terus

berupaya melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan forum satu data serta terus melakukan proses integrasi data dari seluruh *stakeholder* Diskominfo Kota Banda Aceh;

- Diskominfo terus melakukan penguatan implementasi Satu Data Indonesia dengan memastikan penerapan standar metadata statistik dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh OPD, mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2021;
- Meningkatkan pengawasan dan pelaporan untuk memastikan kesesuaian standar data dimana hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas data statistik;
- Melaksanakan pendampingan teknis dan koordinasi secara intensif dengan OPD penghasil data dengan cara menyusun jadwal pemutakhiran data statistik sektoral secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan serta ketepatan waktu data yang membuat alur penyampaian dan proses verifikasi data oleh OPD menjadi lebih sederhana;
- Diskominfo terus berkoordinasi dengan BPS terkait dengan pematangan kualitas rencana kerja untuk meningkatkan aktualitas data, terutama melalui pemantauan jadwal diseminasi, melakukan mekanisme verifikasi dan validasi keterbandingan data di seluruh OPD guna memastikan konsistensi;
- Terus melakukan perbaikan proses bisnis Statistik dengan terus melakukan evaluasi rutin atas perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, dengan menggunakan hasil evaluasi sebagai masukan untuk perbaikan berkesinambungan.
- Terus memperkuat kolaborasi dengan BPS dan ajukan bukti dukung yang lebih relevan untuk mencerminkan kegiatan statistik yang dilakukan pemerintah daerah serta untuk memaksimalkan pemanfaatan Statistik nasional dan *Big Data*;

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Website OPD yang Aktif

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 86%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai angka 97,7%. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawab. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar semua OPD memiliki situs/website dan mengaktifkan situs/website OPD tersebut sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui situs/website OPD yang aktif dapat dinilai keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan *city branding* kepada masyarakat luas, bukan hanya level kota, namun juga pastinya akan menyentuh level provinsi, nasional bahkan dunia internasional. OPD juga mulai melirik pemanfaatan media sosial yang memiliki segmentasi pembaca/pengikut (*followers*) yang menyasar kaum muda secara luas.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan di dalam mencapai target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif adalah :

- Beragamnya tingkat respon keaktifan OPD dalam mengupdate website yang dimiliki sehingga menyebabkan informasi yang dimuat di dalam website OPD tidak terbaharukan, jumlahnya terbatas dan membuat berita dan informasi yang dihasilkan dan disebarkan melalui media kurang menarik;
- Produksi berita atau informasi belum sesuai dengan standar penulisan berita atau informasi, serta hanya berorientasi dengan jumlah yang diproduksi bukan kualitas yang dihasilkan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana produksi berita;
- Masih terdapat OPD yang tidak atau kurang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas di dalam

melakukan updating berita atau informasi ke dalam website yang dimiliki;

- Adanya dualisme layanan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat yaitu melalui SP4N-LAPOR! dan *Quick Response* yang belum terintegrasi satu sama lain;
- Divisi Collaboration Hub yang baru dibentuk pada awal tahun 2025 masih memiliki kekurangan dan kesenjangan di dalam sarana dan prasarana, belum terintegrasinya data yang dimiliki sehingga performa belum maksimal, dan
- Kualitas dan konsistensi data yang masih belum sempurna dimana hal ini disebabkan oleh belum semua OPD memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menyajikan berita dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif adalah:

- Diskominfo terus berupaya untuk mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Selain itu Diskominfo terus berupaya memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website sehingga jumlah persentase website yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik;
- Diskominfo terus melakukan koordinasi dan mengharapkan inisiasi serta keaktifan dari setiap OPD di Kota Banda Aceh baik melalui rapat rutin, bimbingan teknis dan pendampingan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website OPD;
- Melakukan koordinasi intensif dengan tim Collaboration Hub agar proses pelaporan dan *quick response* bisa lebih maksimal;

- Memaksimalkan dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi, pengaduan masyarakat dan publikasi media untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih di tahun 2025
- Upgrade Aplikasi PPID Kota Banda Aceh Versi 2.0 dan pemanfaatan aplikasi Monitoring Media Analytic apabila anggaran bisa disediakan;
- Diskominfo terus melakukan pelatihan dan perancangan SOP Collaboration Hub untuk meningkatkan performa baik dari segi *quick response*, *city branding* dan manajemen media informasi yang beredar di masyarakat

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian indikator Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 61%. Tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dikarenakan perbandingan dari mampu dilayaninya jumlah OPD yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh oleh Diskominfo. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Dikarenakan pada kriteria indikator kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dikelola oleh Diskominfo menyatakan bahwa semua aplikasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh melalui setiap OPD, baik aplikasi khusus maupun publik, wajib dikelola oleh Diskominfo Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City. Oleh karena itu diharapkan Diskominfo mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap OPD yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfo selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan

Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti masterplan/blue print SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), aspek manajemen SPBE dan aspek Audit TIK yang dimiliki serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan OPD lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfo mampu untuk terus bekerja sama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan di dalam mencapai target kinerja Persentase Cakupan Layanan E-Government adalah :

- Diskominfo masih memiliki kelemahan di dalam jumlah SDM terutama tenaga ahli IT (*programmer, networking, IT Support, dll*) yang dibutuhkan serta anggaran yang diberikan kepada Diskominfo belum memadai;

- Masih banyaknya perangkat kerja IT yang dimiliki oleh Diskominfo belum dilakukan peremajaan sehingga kualitas kinerja masih belum maksimal;
- Belum semua OPD memiliki data elektronik yang bisa diintegrasikan sehingga di dalam pemanfaatannya masih menggunakan data manual yang tidak sesuai dengan penilaian SPBE;
- Pembangunan aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh masih banyak yang tidak mempertimbangkan proses bisnis dan peta rencana SPBE yang terintegrasi sehingga menimbulkan redudansi fungsi aplikasi yang dibangun dan tidak bisa dilakukan integrasi;
- Belum adanya mekanisme perencanaan strategis SPBE yang dilakukan secara sistemik yang meliputi jadwal rutin, pelaksanaan program yang terencana dengan baik dan terstruktur, agar perencanaan strategis SPBE menjadi lebih baik lagi di masa akan datang;
- Belum adanya mekanisme pelaksanaan SPBE secara sistemik yang meliputi jadwal rutin, pelaksanaan program yang terencana dengan baik dan terstruktur agar pelaksanaan kematangan domain teknologi informasi dan komunikasi SPBE menjadi lebih baik lagi di masa akan datang, dan
- Belum adanya pembaharuan mekanisme tim koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan SPBE secara sistemik yang meliputi jadwal rutin, pelaksanaan program yang terencana dengan baik dan terstruktur.

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja Persentase Cakupan Layanan E-Government adalah :

- Melakukan permintaan penambahan SDM Ahli di posisi-posisi yang masih belum terisi, penambahan anggaran untuk melakukan peremajaan dan pemeliharaan perangkat yang dimiliki serta memperbanyak bimtek/diklat/pelatihan kepada SDM yang dimiliki;
- Meningkatkan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dimana sebagian besar penerapan pada

aspek Layanan Administrasi Pemerintahan di Kota Banda Aceh sudah cukup baik, yaitu dengan penerapan aplikasi Srikandi, Simpeg dan i-Ren yang memperlihatkan adanya fitur transaksional berupa mekanisme persetujuan dan validasi;

- Meningkatkan aspek layanan publik berbasis elektronik diaman secara umum, penerapan pada aspek Layanan Publik Pemerintahan di Kota Banda Aceh sudah terpenuhi, yakni dengan pengelolaan whistle blowing system (WBS) yang menggunakan aplikasi WBS dan proses perizinan yang menggunakan aplikasi sicantik dan penerapan MPP Digital, ketiganya telah memiliki fitur transaksional;
- Melakukan rapat rencana tindak lanjut implementasi arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran Kota Banda Aceh bersama Bappeda dan BPPK dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- Membuat dokumen resmi (Nota Kesepahaman/Surat Edaran/Surat Keputusan) terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE sehingga pelaksanaan SPBE menjadi salah satu program prioritas daerah;
- Melakukan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang dipimpin oleh Bappeda secara berkala untuk memastikan ketercapaian target SPBE, dan
- Penambahan sarana dan prasarana TIK baru untuk menunjang kinerja Diskominfo di dalam perwujudan internet terpusat dimana dalam hal ini Diskominfo akan mengambil alih semua anggaran internet OPD untuk dikelola terpusat pada Diskominfo di dalam rangka memenuhi kriteria penilaian SPBE.

3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program Diskominfo

Sementara itu dalam mencapai target kinerja pada sasaran Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi dan Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik pada Tahun 2025 diperlukan capaian kinerja yang mumpuni (seperti yang bisa dilihat pada sub bab sebelumnya) dan didukung oleh capaian realisasi anggaran 4 (empat) program pendukung

utama yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo dan memiliki 5 (lima) kegiatan yang kemudian dirincikan dengan sub-sub kegiatan.

Analisis efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumberdaya/biaya untuk mencapai hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1(satu) maka akan terjadi efisiensi
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu) maka efisiensi tidak tercapai

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program yang telah dilaksanakan pada Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6.

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Semester II Tahun 2025		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA
		Target (Renstra)	Capaian		Pagu DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indikator 1: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Persentase	31	31	100	-	-	-
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja				100	Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		0
Tingkat Efisiensi =					0		

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu tidak dapat dianalisis dikarenakan oleh program ini tidak memiliki anggaran namun indikator tetap dilaksanakan dikarenakan indikator ini penting untuk dilaksanakan untuk mengetahui Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu.

Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Semester II Tahun 2025		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA
		Target (Renstra)	Capaian		Pagu DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indikator 2: Persentase website OPD yang aktif	Persentase	86	86	100	14.184.389.200	13.448.978.070	94,82
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja				100	Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		94,82
Tingkat Efisiensi =					1,05		

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Persentase website OPD yang aktif tercapai dengan tingkat efisiensi 1,05%.

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 3

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Semester II Tahun 2025		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA
		Target (Renstra)	Capaian		Pagu DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indikator 3: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	61	61	100	5.395.461.109	4.877.192.935	90,39
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja				100	Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		90,39
Tingkat Efisiensi =					1,11		

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan tercapai dengan tingkat efisiensi 1,11%.

3.1.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfo Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan Tujuan dari Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yaitu Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, dimana Diskominfo harus mampu untuk terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut Diskominfo harus terus berkembang, semakin melengkapi dan memperbaharui diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja tinggi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2025 memiliki beberapa tugas dan target yang harus dicapai seperti:

1. Melanjutkan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh yang telah terpilih sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayanan Smart City. Salah satu yang utama adalah Diskominfo terus memperbaiki kualitas fasilitas *command center* yang telah dibangun pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung keterwujudan konsep Smart City sebagai upaya perbaikan pelayanan publik pada Kota Banda Aceh. *Command center* yang juga sebagai ruang pusat kontrol pemantau berfungsi sebagai pusat kontrol data internal yang bisa memonitor langsung keadaan Kota Banda Aceh melalui kamera pemantau atau CCTV yang terpasang pada titik-titik vital. Selain itu fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat kontrol komando monitor data-data, aplikasi-aplikasi dan juga sistem terintegrasi yang berada pada pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfo terus berupaya untuk melaksanakan Dokumen atau *Master Plan* Smart City sebagai menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City, melakukan koordinasi dan elaborasi serta terus melakukan upaya-upaya kesinambungan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan OPD-OPD terkait dengan

kesinambungan upaya Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan konsep pelayanan Smart City.

2. Pembentukan divisi Collaboration Hub yang bertugas sebagai jembatan dan kolaborator antara para *stakeholder* yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh agar sinergitas Pemerintah Kota dengan para *stakeholder* menjadi lebih baik dan erat. Selain itu divisi ini juga bertugas di dalam melakukan *quick response* terhadap segala aduan dan laporan dari warga Kota Banda Aceh, *city branding* dari Kota Banda Aceh dengan produksi visual dan narasi utama Kota Banda Aceh dan manajemen media yang berfungsi sebagai pengelola arus informasi yang beredar di Masyarakat Kota Banda Aceh dan juga sosial media.
3. Meningkatkan indeks pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh yang berada di dalam Cakupan Layanan E-Government Pemerintah Kota Banda Aceh. Tahun 2024 pencapaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh berada pada angka rating 3,70 (Sangat Baik) dimana pengukuran indeks ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
4. Memperbaiki dan meningkatkan pemenuhan data statistik sektoral pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfo terus melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral serta untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Selain itu penerapan kebijakan Satu Data Indonesia akan terus disosialisasikan kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota sehingga membutuhkan optimalisasi sistem data terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data.
5. Peningkatan kualitas sistem dan diseminasi informasi dan komunikasi publik yang berada pada wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh yang menjadi tugas Diskominfo. Selain itu diskominfo selalu berupaya menjaga predikat Kota Banda Aceh sebagai Kota dengan Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan pengelolaan informasi publik dan juga sistem pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!

6. Pelatihan dan Penguatan Admin PPID dan SP4N LAPOR OPD akan terus dilakukan bersamaan dengan updating dokumen informasi publik (Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan) serta memaksimalkan dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi, pengaduan masyarakat dan publikasi media.
7. Upgrade Aplikasi PPID Kota Banda Aceh Versi 2.0 dan pemanfaatan aplikasi Monitoring Media Analytic juga akan dilaksanakan untuk mewujudkan digitalisasi dan keamanan informasi,

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun 2025, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo seperti :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam pengerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan dikarenakan oleh kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat ;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfo;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
5. Belum memadainya fasilitas diseminasi informasi publik;
6. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki, dan
7. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfo pada tahun kedepannya adalah :

1. Memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo;
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan dan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT dimana tentunya tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
3. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
5. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
6. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
7. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
8. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Optimalisasi divisi Collaboration Hub, fasilitas Command Center, SP4N-LAPOR! dan seluruh elemen Diskominfo di dalam era digitalisasi;
10. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi, dan
11. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Diskominfo pada Tahun 2025 adalah sebesar 96,12% dari total anggaran yang dialokasikan berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Diskominfo Kota Banda Aceh. Realisasi Keuangan Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Diskominfotik Semester II Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (DPPA)	Realisasi Anggaran	%
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7.011.502.525	7.249.770.064	103,40
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.027.100	7.602.100	63,21
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.027.100	7.602.100	-
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.778.156.325	4.274.015.056	113,12
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.778.156.325	4.274.015.056	113,12
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.310.400	102.954.860	81,51
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.230.300	4.230.300	100,00
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.265.000	15.645.900	96,19
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.815.100	9.521.600	30,90
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	73.557.060	98,08
	E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.279.300	549.375.751	98,23
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
		2 Pengadaan Mebel	-	-	-
		3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	559.279.300	549.375.751	98,23
	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.172.136.800	2.016.235.627	92,82
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	977.038.000	876.737.483	89,73
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.195.098.800	1.139.498.144	95,35

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.592.600	299.586.670	82,40
	G	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.500.600	254.194.620	81,60
		2 Pemeliharaan Mebel	-	-	-
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.092.000	45.392.050	87,14
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
II		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	14.184.389.200	13.448.978.070	94,82
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.184.389.200	13.448.978.070	94,82
	A	1 Relasi Media	10.410.608.400	10.064.688.000	96,68
		2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	-	-	-
		3 Pelayanan Informasi Publik	26.414.000	7.884.000	29,85
		4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	20.552.400	7.884.000	38,36
		5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.726.814.400	3.368.522.070	90,39
		6 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	-	-	-
		7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	-	-	-
III		Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.395.461.109	4.877.192.935	90,39
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.395.461.109	4.877.192.935	90,39
	A	1 Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	-	-	-
		2 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	456.633.300	336.539.220	73,70
		3 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	283.850.000	272.300.000	95,93

		4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.654.977.809	4.268.353.715	91,69
		5	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas			-
		6	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	-	-	-
		7	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	-	-	-
IV	Penyelenggaraan Statistik Sektoral			-	-	-
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	A	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	-	-
		2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	-	-	-
V	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			17.000.000	-	-
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000	-	-
	A	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	17.000.000	-	-
	B		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
TOTAL				26.608.352.834	25.575.941.069	96,12

Berdasarkan Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Diskominfo Tahun 2025 mencapai angka Rp 25.575.941.069,- atau sebesar 96,12% dari anggaran yang diberikan yaitu Rp 26.608.352.834,-. Ada beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfo yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan sudah masuk di dalam Renja serta DPPA Diskominfo namun tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun

2025. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Serapan dan realisasi keuangan terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai angka dan presentase Rp 7.249.770.064,- atau 103,40%. Sementara itu serapan dan realisasi keuangan terkecil berada pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebanyak Rp 4.877.192.935,- atau 90,39%. Sementara itu anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan penghapusan dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi tidak dapat dikeluarkan berdasarkan kebijakan *refocusing* dan SPD ketat sehingga pelaksanaan dan realisasi anggaran tidak bisa dilakukan sehingga memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian kembali anggaran yang diberikan serta pengalihan anggaran kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.

Hal ini terjadi pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik, Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda, Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas, Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE, Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.2.1. Capaian Diskominfofik Sepanjang Tahun 2025

Diskominfofik dalam pelaksanaan tupoksinya pada tahun 2025 telah berhasil dalam meraih berbagai prestasi yang membanggakan seperti:

1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP)

Bidang PIP telah berhasil membantu Pemerintah Kota Banda Aceh meraih predikat "Sangat Baik" dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Kemendagri, menjadi satu dari tiga Pemkot se-Indonesia yang meraih predikat tertinggi yaitu “Sangat Baik”. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga meraih peringkat terbaik pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan nilai 99,0 dengan Kualifikasi “Informatif” pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.



2. Bidang Statistik

Bidang Statistik telah berhasil dalam membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berdasarkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) bersama dengan BPS dengan nilai 1,83 pada tahun 2023 menjadi 2,57 pada tahun 2024

3. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City telah berhasil dalam membantu Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai satu-satunya Kabupaten/Kota se-Aceh yang mengikuti Evaluasi Kota Cerdas/Smart City se-Indonesia dengan nilai indeks final implementasi Smart City sebesar 3,01

4. Bidang E-Government

Bidang E-Government telah berhasil membantu Kota Banda Aceh dalam meningkatkan perolehan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2023 sebesar 3,54 dengan kategori “Sangat Baik” menjadi 3,70 untuk evaluasi pada tahun 2024 dan meraih Terbaik Kedua dalam pengelolaan keamanan siber pada Juni 2024

5. Bidang Sekretariat

Bidang Sekretariat telah berhasil membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh meraih peringkat pertama kepatuhan pelaporan pajak tingkat SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 mendapat Nilai Hasil Evaluasi 86,8 dan Tingkat Akuntabilitas Kinerja “A”.

3.2.2. Strategi/Langkah/Kebijakan Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun banyak hambatan, kesulitan baik dari sisi teknis maupun anggaran yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2025, usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Diskominfo Kota Banda Aceh. Beberapa strategi, langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut diantara lain :

1. Menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;

2. Perumusan, penyusunan, penataan, penetapan, pembakuan dan evaluasi kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo;
3. Mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat;
4. Melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas dengan optimalisasi anggaran yang diberikan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (BPS, Universitas maupun *stakeholder* lainnya) sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, penguatan implementasi satu data indonesia, peningkatan kualitas data, perbaikan proses bisnis statistik, pengelolaan kelembagaan dengan asas profesionalisme, pemanfaatan statistik nasional dan *big data* dan penguatan tata kelola statistik;
6. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
7. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfo secara berkesinambungan;
9. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi;
10. Terus melakukan sosialisasi dan *transfer knowledge* terkait dengan pelaksanaan kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang harus memuat aturan yang lengkap mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) serta terintegrasi antar pemerintah daerah, dan dijadikan sebagai dasar perencanaan dan belanja SPBE dan kebijakan internal harus

direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

11. Memaksimalkan kordinasi antara Admin Koordinator dan Pejabat Penghubung (OPD) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta mengupayakan ketersediaan anggaran untuk dapat menggelar Rapat Teknis seluruh tim teknis pengelola layanan pengaduan masyarakat secara rutin dan simultan;
12. Optimalisasi pencapaian target dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, pelaksanaan monitoring, pengelolaan dan peningkatan koordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik, dan
13. Menerapkan secara rutin mekanisme *reward dan punishment* yang telah ditetapkan oleh Kepala Diskominfo sehingga seluruh ASN Diskominfo mendapatkan motivasi dan semangat lebih di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga linear dengan capaian kinerja Diskominfo.
14. Optimalisasi seluruh elemen yang saat ini dimiliki oleh Diskominfo seperti Command Center Room, Collaboration Hub, SP4N-LAPOR! dan lainnya di dalam pencapaian kinerja Diskominfo.

Diharapkan dengan adanya usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, kinerja dan performansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfo Kota Banda Aceh serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo pada bidang urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Renstra Diskominfo tahun 2023-2026 sebagai pendukung pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Secara keseluruhan pelaksanaan dan pencapaian kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 sudah baik. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Tahun 2025 yang mencapai angka 96,12% dimana total anggaran yang diberikan adalah Rp 26.608.352.834,- dan total realisasi anggaran mencapai Rp 25.575.941.069,-. Terdapat beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfo yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfo tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Langkah-langkah, strategi, dan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, perumusan, penyusunan, penataan, penetapan, pembakuan dan evaluasi kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis, mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas, melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral, koordinasi dengan pihak-pihak terkait (BPS, Universitas maupun stakeholder lainnya) sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, penguatan implementasi

satu data indonesia, peningkatan kualitas data, perbaikan proses bisnis statistik, pengelolaan kelembagaan dengan asas profesionalisme, pemanfaatan statistik nasional dan big data dan penguatan tata kelola statistik, melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral, meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfo secara berkesinambungan, meningkatkan kesadaran keamanan data dan informasi dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi, melakukan sosialisasi dan *transfer knowledge* terkait dengan pelaksanaan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah, memaksimalkan koordinasi antara Admin Koordinator dan Pejabat Penghubung (OPD) dan menggelar Rapat Teknis seluruh tim teknis pengelola layanan pengaduan masyarakat secara rutin dan simultan, menerapkan secara rutin mekanisme *reward dan punishment* yang telah ditetapkan oleh Kepala Diskominfo sehingga seluruh ASN Diskominfo mendapatkan motivasi dan semangat lebih di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga linear dengan capaian kinerja Diskominfo serta optimalisasi seluruh elemen yang saat ini dimiliki oleh Diskominfo seperti Command Center Room, Collaboration Hub, SP4N-LAPOR! dan lainnya di dalam pencapaian kinerja Diskominfo.

Demikian LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja instansi dan organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 15 Januari 2026

**Pt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



Ir. MUHAMMAD ZUBIR, S.SiT.,M.Si.

Pembina Tingkat I /

NIP. 19780816 200012 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						Ket
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja			Satuan	Target	
1				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		-	
											Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		-	
											Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		4.855.653.265	
											Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		33	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		2.094.810.000	
											Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		201.657.103	
											Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		60	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		5.861.356	
											Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		-	
											Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		15.495.747	
											Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)		100.000.000	
											Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20	
											Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%		100	

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) - Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 3 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
										Pengadaan Mebel	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) - Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 13 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 133.319.890 Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 10 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 698.609.113 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 51.925.330 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 90.487.100 Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
										Pemeliharaan Mebel	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) - Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 13 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 158.126.948 Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 58 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 30.000.000 Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 1 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100
8.435.945.852											
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik	Persentase website OPD yang aktif	86%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%	Relasi Media	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 688.899.913 Keluaran : Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media Laporan 5 Hasil : Persentase website OPD yang aktif % 86
										Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 30.935.900 Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo Komunitas 1 Hasil : Persentase website OPD yang aktif % 86 Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 60.000.000

								Pelayanan Informasi Publik	Keluaran	:	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	Permohonan	1	
									Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
								Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	55.888.307	
									Keluaran	:	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	
									Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	58.371.382	
									Keluaran	:	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	Media	1	
									Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
								Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.000.000	
									Keluaran	:	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	Dokumen	1	
									Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
								Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.000.000	
									Keluaran	:	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/ Pelatihan	Orang	45	
									Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
924.095.502														
Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	46.742.000	
									Keluaran	:	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Laporan	1	
									Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
								Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	38.150.919	
									Keluaran	:	Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	
									Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
								Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	42.987.367	
									Keluaran	:	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/ atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	
									Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	153.115.626	
									Keluaran	:	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/ Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Perangkat Daerah	44	
									Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
								Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000	
									Keluaran	:	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Program	1	
									Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	

										Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	76.204.000	
											Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
										Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
															457.199.912
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	7.076.730	
											Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	44	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
															7.076.730
3	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	68	
											Hasil	: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	31	
										Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000	
											Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	34	
											Hasil	: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	31	
															100.000.000
															9.924.317.996
															JUMLAH
															9.924.317.996

Banda Aceh, 17 Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh



ALIZAR, S.Ag., M.Hum
Pembina Utama Muda / 19691117 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE
jabatan : Wali Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

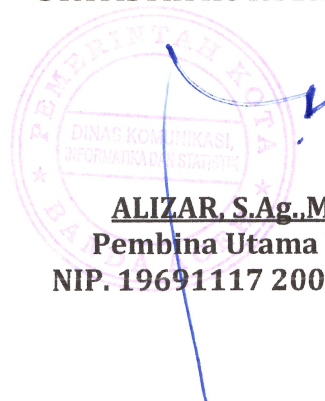
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 14 Februari 2025

Pihak Kedua
WALI KOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH



ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	1	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu	Persentase	31
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	2	Persentase Website OPD yang Aktif	Persentase	86
		3	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	Persentase	61

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.435.945.852	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	924.095.502	Mendukung Indikator Persentase Website OPD yang Aktif
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	457.199.912	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.000.000	Mendukung Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7.076.730	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
Jumlah		9.924.317.996	

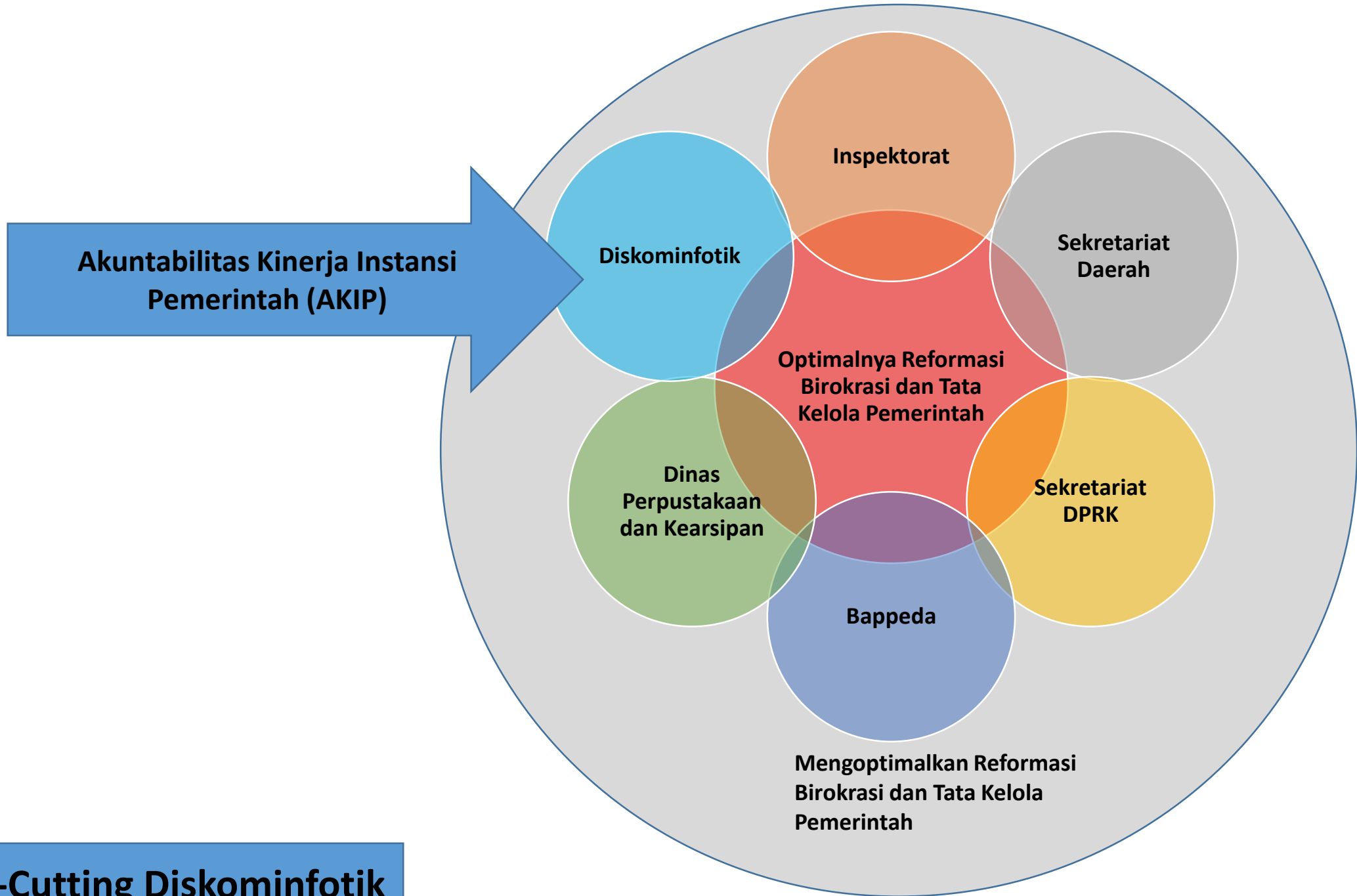
Banda Aceh, 14 Februari 2025

WALI KOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda / NIP.19691117 200112 1 002

CASCADING KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK																																								
VISI																																								
MISI																																								
TUJUAN RPD		Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																																						
SASARAN RPD		Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																																						
IKU RPD		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																																						
TUJUAN SKPD		Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh																																						
INDIKATOR TUJUAN		Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi																																						
SASARAN SKPD		Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik																							Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi															
Indikator Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024		Persentase Website OPD yang Aktif										Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan													Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu															
Program Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik										Program Pengelolaan Aplikasi Informatika													Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral													
KEGIATAN Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
Sub Kegiatan Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024		Relasi Media	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Dieminasi Informasi	Pengeladaan Media Komunikasi Publik	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Penyusunan Konten	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Koordinasi Penerimaan Pusat Data Nasional	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengeladaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelenbagan Statistik Sektoral	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
Indikator capaian Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024		Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasi Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akurat serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase khalayak sasaran yang tercapai informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkenbang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase khalayak yang tercapai informasi publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	Jumlah Konten Informasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Disiliasi Mengikut Bmtek/Pelatihan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Jumlah data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan/penggunaan deraan dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditelapkan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang nrlis tepat waktu	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah diintegrlapi metadada	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik
Output Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024		Laporan	Komunitas	Laporan	Permohonan	Persentase	Rekomendasi	Persentase	Media	Dokumen	Konten	Orang	Aplikasi	Dokumen	Laporan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Aplikasi	Aplikasi	Dokumen	Unit	Perangkat Daerah	Layanan	Dokumen	Program	Dokumen	Aplikasi	Perangkat Daerah	Dokumen	Laporan	Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Orang	Persentase	Persentase	Dokumen	Dokumen



Tujuan

Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

Strategi 1

Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas

Strategi 2

Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral

Strategi 3

Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi

Strategi 4

Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi

Strategi 1

Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral

Kebijakan 1

Melakukan pengembangan SDM terkait TIK

Kebijakan 2

Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik

Kebijakan 3

Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK

Kebijakan 4

Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi

Kebijakan 5

Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku

Sasaran 2

Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi

Strategi 1

Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral

Kebijakan 1

Pengembangan SDM terkait pengolahan data sektoral dengan jalan bimtek dan sosialisasi

Kebijakan 2

Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Cross-Cutting Diskominfo

Tujuan

Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

Sasaran 2

Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi

IKU 1

Persentase Website OPD yang Aktif

Program 1

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan 1

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Relasi Media

Sub Kegiatan
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik

Sub Kegiatan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Sub Kegiatan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

IKU 2

Cakupan Layanan e-Government yang Dilaksanakan

Program 2

Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan 2

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda

Sub Kegiatan
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

Sub Kegiatan
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan
Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

Sub Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE

Sub Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

Program 3

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan 3

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Kegiatan 4
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

IKU 3

Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu

Program 4

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan 5

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Cross-Cutting Diskominfo

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	IKU RPD	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Relasi Media Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media
									Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo
									Pelayanan Informasi Publik Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan
									Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah
									Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis
									Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun
									Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan
									Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
									Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
									Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan e-government yang dikelola	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
									Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
									Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
									Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
									Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
									Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik
									Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan
									Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik
									Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan